

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus: SD No. 11 Jimbaran)

A.A. Ayu Sita Dewi Wijayanti¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Putu Eka Purnamaningsih³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ayusitadewiwijayanti@gmail.com¹⁾, piers_noak@yahoo.com²⁾,
ekapurnama.galon@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Inclusive education is an educational service system that provides opportunities for all children to study together in a public school with attention to diversity and individual needs. The purpose of this research is to know the implementation of inclusive education for crew in SD No. 11 Jimbaran and obstacles in the implementation of this inclusive education. This study uses descriptive qualitative research methodology. In obtaining the data, the authors make direct observations to the field to obtain the primary data related and conduct documentation studies to obtain secondary data. In addition, the researcher uses techniques such as direct and indirect interviews related to this research. The conclusion of this research is Implementation of Inclusive Education in SD No. 11 Jimbaran as a whole has not been effective yet and is not in line with the established standard of inclusive education. The obstacles to be overcome are the availability of special educators, curricula appropriate to inclusive education for ABK

Keywords: *Public Policy, Public Policy Implementation, Inclusive Education, Children with Special Needs*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan pendidikan yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pada UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 5 ayat 1 berbunyi setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan tidak

hanya ditujukan untuk anak normal saja, tentu bermanfaat pula untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, sangat sedikit dari ABK yang dapat menikmati indahnya pendidikan karena adanya diskriminasi dari lingkungan sekitarnya.

Salah satu wadah bagi para ABK untuk mengenyam pendidikan yang telah di upayakan oleh pemerintah Indonesia yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendidikan untuk semua (*Education for all*) menjadi solusi alternatif sebagai pencetus adanya

pendidikan inklusif di masyarakat. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini diperlukan wadah yang nantinya disebut sebagai sekolah inklusi, sekolah inklusi di definisikan sebagai sekolah reguler yang bersedia menerima ABK sebagai peserta didiknya. Pendidikan inklusif di Kabupaten Badung dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 421/16251/Disdikpora, tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Layanan Pendidikan Inklusif Provinsi Bali. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung menyatakan SD No. 11 Jimbaran sebagai sekolah formal penyelenggara layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Badung. Jenis ABK yang diterima di SD No. 11 Jimbaran seperti anak lamban belajar, anak kesulitan belajar, tunagrahita, tunadaksa, dan tunarungu ringan. ABK pada tahun ajaran 2014/2015 yakni berjumlah 20 siswa dengan keterangan sebagai berikut, 4 anak tunarungu, 10 anak lamban belajar, 1 anak lumpuh layu, 4 anak berkesulitan belajar. Pembelajaran inklusi di SD No. 11 Jimbaran menggunakan kurikulum sekolah reguler umum yang di modifikasi dengan kebutuhan siswa inklusi. Di SD No. 11 Jimbaran memiliki satu orang Guru Pembimbing Khusus (GPK). Tujuh orang tenaga pendidik, Satu Orang Guru Kunjung, satu orang guru pendamping yang telah melalui pelatihan pendidikan inklusif sebelumnya. Beberapa data yang telah diungkapkan sebelumnya menunjukkan bahwa SD No. 11 Jimbaran Kabupaten Badung telah cukup berhasil dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini, salah satunya dengan menjadi satu-satunya

Kabupaten yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Provinsi Bali dan juga menjadi sekolah percontohan dalam pendidikan ABK. Hal ini yang menarik penulis untuk menganalisa lebih dalam bagaimana pengimplementasian pendidikan inklusif di SD No. 11 Jimbaran dan menganalisa faktor-faktor yang sekiranya menjadi penghambat dalam pendidikan inklusif. Melihat latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut berkaitan dengan "Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Lingkup Sekolah Inklusi (Studi Kasus SD No. 11 Jimbaran Kabupaten Badung)".

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Edward III memiliki 4 variabel yang dapat menentukan kesuksesan dari implementasi kebijakan menamakan model implementasi kebijakan. (Agustino, 2014: 149) pertama yaitu variabel komunikasi berpengaruh dalam menentukan keberhasilan implementasi dalam suatu kebijakan untuk pencapaian tujuan. Jika komunikasi terjalin dengan baik kebijakan yang dibuat akan tertransmisikan dengan baik pula, terutama kepada implementor-implementor kebijakan tersebut. Kedua, Variabel Sumberdaya yang di bagi menjadi beberapa elemen diantaranya Staf, merupakan sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan karena berperan sebagai pelaksana kebijakan. Informasi, ada dua bentuk yakni ada informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dalam implementasi kebijakan. Selaku pelaksana kebijakan implementor

hendaknya mengetahui dan memahami tindakan apa yang harus mereka ambil ketika ada perintah. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan ini dapat menentukan kesuksesan dari implementasi kebijakan, memupuk adanya kerjasama yang bertujuan untuk keberhasilan kebijakan. Kinerja struktur birokrasi/organisasi memiliki 2 karakteristik diantaranya, melakukan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.

Filosofi sistem pendidikan inklusif adalah merupakan sistem pendidikan yang menghargai bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang berbeda-beda, menghargai dan menghormati bahwa semua orang merupakan bagian dari masyarakat. Dengan adanya perbedaan setiap manusia dapat berinteraksi untuk saling melengkapi kekurangannya. Pandangan layanan pendidikan bagi para penyandang cacat adalah layanan pendidikan dengan menggunakan pendekatan *humaistik*.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan di lapangan. Peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung serta memadumadankannya dengan data yang diperoleh dari dokumentasi di lapangan. Lokasi penelitian ini yaitu di SD No. 11 Jimbaran, Kabupaten Badung. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu *purposive sampling* yang di kolaborasikan dengan teknik *snowball sampling*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan administrasi dan proses belajar pendidikan inklusif dipengaruhi oleh sumberdaya manusia yang dalam hal ini yaitu pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. SD No. 11 Jimbaran dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan dibantu oleh dua puluh empat orang guru dan tiga orang karyawan.

Pembelajaran inklusi di SD No. 11 Jimbaran menggunakan kurikulum sekolah reguler umum yang dimodifikasi, Proses penerimaan ABK tidak jauh berbeda dengan penerimaan siswa reguler yang mana dilakukan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Perbedaan penerimaan siswa ABK di sekolah inklusi terletak pada observasi yang dilakukan berkaitan dengan kemampuan anak dalam emosi, sosial, perilaku, dan kognitif. Pengisian formulir untuk siswa ABK pun berbeda karena mengikuti hasil dari observasi kekhususan yang dimiliki oleh ABK tersebut.

Bangunan SD No. 11 Jimbaran terdiri dari halaman depan dan belakang, gedung utama, dan kantin sekolah. SD No. 11 Jimbaran memiliki beberapa ruangan yang dipergunakan sebagai lokasi belajar mengajar maupun aktivitas yang terjadi di sekolah, delapan ruang kelas, satu ruang Kepala Sekolah, satu ruangan guru, satu perpustakaan, satu ruang komputer, satu ruang UKS sekaligus sebagai ruang terapi, satu WC Guru, enam WC Siswa, dan kantin, lapangan yang luas serta area parkir juga tersedia di sana. Tempat ibadah juga terlihat ada di sana.

Untuk pelaksanaan pendidikan inklusif Sekolah telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang cukup. Sarana khusus berupa alat terapi motorik bagi siswa ABK

serta fasilitas seperti kursi roda yang memudahkan akses untuk ABK.

Transmisi, menghendaki agar kebijakan pendidikan inklusif bagi ABK disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja pendidikan inklusif bagi ABK melainkan disampaikan pula kepada pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan pendidikan inklusif serta kelompok sasaran kebijakan bagi ABK tersebut.

Kejelasan, informasi kebijakan yang ditransmisikan pada para implementor kebijakan pendidikan inklusif bagi ABK hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan pendidikan inklusif bagi ABK tersebut. Ketidakkonsistenan perintah akan mendorong para pelaksana kebijakan pendidikan inklusif bagi ABK mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan pengimplementasian kebijakan pendidikan inklusif bagi ABK.

Komunikasi merupakan langkah yang paling mudah dan efektif untuk penyampaian informasi suatu kebijakan baik yang masih dalam perumusan maupun kebijakan yang baru di buat. Dengan adanya komunikasi ini, salah satu tujuannya kebijakan yang di buat dapat sampai pada sasaran yang di tuju dari suatu kebijakan. Ketika pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya sesuai dengan yang dibutuhkan ini menyebabkan perintah implementasi tidak akan diteruskan secara jelas dan konsisten maka implementasi pun cenderung kurang efektif, sehingga perlu adanya perintah yang tegas dan konsisten. SDM berpengaruh terhadap keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam proses pendidikan inklusif SD No.11 Jimbaran menggunakan kurikulum yakni kurikulum yang dimodifikasi dari kurikulum sekolah reguler sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan ABK. Sarana yang sudah ada di SD No. 11 Jimbaran antara lain jalan naik untuk kursi roda, meja kroak, komputer inklusi, tetapi anak reguler juga menggunakan peralatan tersebut, karena kebetulan juga tidak ada ABK yang menggunakannya. Semua jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak-anak inklusi di SD No. 11 Jimbaran lumayan tersedia. Selain adanya keterbatasan jumlah sarana dan prasarana maka penggunaannya sama dengan anak reguler. Alat untuk anak berkebutuhan khusus jumlahnya sudah cukup. Oleh karena itu, dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sudah cukup memadai, maka pihak sekolah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik.

Hasil dari penelitian ini menemukan terdapat dua faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD No. 11 Jimbaran yaitu masih kurangnya tenaga pendidik khusus yang merupakan komponen penting dalam mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya, faktor kurikulum yang belum fleksibel untuk ABK karena masih menggunakan kurikulum kolaborasi dari kurikulum sekolah reguler dengan kebutuhan belajar dari ABK.

5. KESIMPULAN

Implementasi pada program Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Lingkup Sekolah Inklusi di SD No. 11 Jimbaran secara umum sudah berjalan dengan baik dan efektif, karena telah mampu menerima ABK bahkan jumlah siswa ABK setiap tahun ajaran baru selalu mengalami peningkatan. Selain itu, SD No. 11 Jimbaran juga telah mampu meluluskan siswa ABK dan mengalokasikannya ke sekolah yang layak untuk ABK. Keragaman jenis ABK yang bersekolah di SD No. 11 Jimbaran juga dapat di jadikan bahan evaluasi bahwa program pendidikan inklusif di Kabupaten Badung sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Selain itu, dengan ditunjuknya SD No. 11 Jimbaran sebagai sekolah percontohan dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga dapat di jadikan bukti bahwa program pendidikan inklusif yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yang di teruskan kepada pemerintah Daerah telah tersampaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh implementor-implementor yang mengikuti situasi dan kondisi yang disesuaikan di setiap daerahnya. Faktor penghambat dalam Pengimplementasian Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi ABK dalam Lingkup Sekolah Inklusif di SD No. 3 Jimbaran yakni ketersediaan sumber daya manusianya maka penyelenggara pendidikan inklusif yaitu masih kurangnya jumlah tenaga pendidik seperti Guru Pendamping Khusus dalam mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilihat dari kurikulum yaitu belum adanya kurikulum

Anak Berkebutuhan Khusus disesuaikan dengan kondisi anak dan belum adanya standar kurikulum yang digunakan Anak Berkebutuhan Khusus karena kurikulum hanya mempermudah atau dimodifikasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2014, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Garnida, Dadang, 2015, *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: Refika Aditama.
- Pratiwi, R.P., dan Murtiningsih, A., 2013, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Arikunto, Suharsini, 2007, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gsajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offest.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Direktorat Pembinaan SLB (2007). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta.

UNESCO (1994). *The Salamanca Statement and Framework For Action On Special Needs Education*. PARIS:Author.

ILO (2001), *Code of practice on managing disability in the workplace*, Tripartite Meeting of Experts on the Management of Disability at the Workplace. Geneva.

WinarnoSurakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah dasar dan Metode Teknik*. Bandung: tarsito.

Karya Ilmiah :

1. Hanjarwati dan Aminah. 2014. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Mengenai Pendidikan Inklusi*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
2. Hery Kurnia Sulistyadi. 2014. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo*. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
3. Jamilah Candra Pratiwi. 2015. *Sekolah Inklusi Untuk Anak Bekerbutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya*. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Pascasarjana UNS.
4. Ery Wati. 2014. *Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar negeri 32 Kota Banda Aceh*. Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
5. Haryono, dkk. 2015. *Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Provinsi Jawa Tengah*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.
6. Fatma Laili Khoirun Nida. 2013. *Komunikasi Bagi Anak Berkebutuhan*

Khusus. Jurusan Dakwah dan Komunikasi STAIN Kudus.

7. Nissa Tarnoto. 2009. *Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Tingkat SD*. Fakultas Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
8. Megan Mackey. 2014. *Inclusive Education in The United States: Middle School General Education Teachers' Approaches to Inclusion*. University of Hartford, United States of America.
9. Twiggy Chan & Mantak Yuen. 2015. *Inclusive Education in an International school: A Case study From Hong Kong*. The Univerity of Hong Kong.
10. Jeremy Ford. 2013. *Educating Students with Learning Disabilities in Inclusive Classrooms*. University of Iowa.

Peraturan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Surat Edaran Gubernur Nomor: 421/16251/Disdikpora, tertanggal 22 Oktober 2014 tentang layanan Pendidikan Inklusif Provinsi Bali.
3. Permendiknas Nomor: 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi.
4. Amanat Pembukaan UUD 1945

Website :

1. Dokumen Salamanca. 2016. <http://fidiupiserang.blogspot.co.id/2014/11/dokumen-dokumen-kebijakan-internasional.html> tanggal 14 Agustus 2016 pada 14.15
2. Profil Sekolah Inklusi SD No. 11 Jimbaran. 2013. <http://sdno11jimbaran-profil.blogspot.co.id/> tanggal 14 Agustus 2016 pada 14.30
3. Unesco.2016.https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Pendidikan,_Keilmuan,_dan_Kebudayaan_PBB tanggal 14 Agustus 2016 pada 15.00

4. Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2013. <http://www.tkplb.org/> tanggal 14 Agustus 2016 pada 15.45